| KEMENTERIAN KEUANGAN RI |
|---------------------------|
| DIREKTORAT JENDERAL PAJAK |
| |
| |

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

| H.1 NOMOR : 2 0 0 0 1 3 7 2 | G/DTP 29.645 |
|--|-----------------|
| A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG A.1 NPWP : 6 8 8 0 7 5 9 4 4 7 2 2 0 0 0 0 A.2 NIK : | |
| A.1 NPWP : 6 8 8 0 7 5 9 4 4 7 2 2 0 0 0 0 A.2 NIK : SUPRIYATUN B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG MASA PAJAK (mm-yyyy) | |
| A.2 NIK : SUPRIYATUN B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG MASA PAJAK (mm-yyyy) KODE OBJEK PAJAK BRUTO (Rp) DASAR PENGENAAN PAJAK (TINGGI 20% (TIDAK BER-NPWP) (TIDAK BER-NPWP) B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.6 B.7 4 21-402-01 592.900 592.900 0 5 Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal 1 3 dd 0 4 mm 2 0 2 2 2 yyyy B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB. | |
| A.3 Nama : SUPRIYATUN B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG MASA PAJAK (mm-yyyy) KODE OBJEK PAJAK BRUTO (Rp) DASAR PENGENAAN PAJAK (TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER-NPWP) B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.6 B.7 4 21-402-01 592.900 592.900 0 5 Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal 1 3 dd 0 4 mm 2 0 2 2 2 yyyy B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB. | |
| B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG MASA PAJAK (mm-yyyy) RODE OBJEK PAJAK (Rp) DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp) RODE OBJEK PAJAK (Rp) DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp) TARIF (%) PPh DIPOTONO (Rp) (Rp) PPh DIPOTONO (Rp) TARIF (%) PPh DIPOTONO (Rp) | |
| MASA PAJAK (mm-yyyy) B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.6 B.7 4 21-402-01 592.900 Masa Pengenaan Pajak (Rp) Momor Dokumen Nama Nama Nama Nama Nama Nama Nama Nama | |
| MASA PAJAK (mm-yyyy) B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.6 B.7 4 21-402-01 592.900 Masa Pengenaan Pajak (Rp) Momor Dokumen Nama Nama Nama Nama Nama Nama Nama Nama | |
| B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.6 B.7 4 21-402-01 592.900 592.900 0 5 Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen Nama Dokumen Nama Dokumen Referensi : Nomor Dokumen Nama Dokumen Referensi : Nomor Dokumen Nama Dokumen Referensi : Nomor Dokumen Re | 29.645 |
| Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen | 29.645 |
| B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen | |
| B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan : C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK | <u> </u> |
| C.1 NPWP Instansi Pemerintah : 9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0 0 C.2 Nama Instansi Pemerintah : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR C.3 ID Subunit Organisasi : 1 3 dd 0 4 mm 2 0 2 2 2 yyyy C.5 Nama Penandatangan : HARI JUMADI C.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan. | ara |

H7VGM9F6